



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR : 1/PW.01/6102/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MEMPAWAH TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pencapaian efektivitas, efisiensi dan ketaatan terhadap perundang-undangan serta kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan KPU Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Sekretariat Jenderal KPU Nomor 1406/PW.01-SD/08/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor 1/PW.01/6102/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2022.
- KEDUA : Struktur dan personil satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Mempawah.
- KELIMA : Pelaksanaan tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dibebankan pada APBN berdasarkan pada Daftar Isian pelaksanaan Anggaran KPU Kabupaten Mempawah Tahun 2022 Nomor DIPA-076.01.2.658461 /2022 tanggal 17 November 2021.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mempawah
Pada Tanggal 11 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH,

ttd.

MUHAMMAD AGOES SOESANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
Plt. Kasubbag Hukum,



Lampiran I : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah
 Nomor : 1/PW.01/6102/2022
 Tanggal : 11 Januari 2022
 Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2022

SUSUNAN PERSONIL SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	Muhammad Agoes Soesanto, SH	Ketua KPU	Pengarah
2	Mursalin, Se.I	Anggota KPU	Pengarah
3	Rasidi, M. Pd.I	Anggota KPU	Pengarah
4	Fetrus Anyim, S. Ag	Anggota KPU	Pengarah
5	Munawaroh, S. Pd	Anggota KPU	Pengarah
6	Eldeni, M.A.P	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
7	Herlita, A.Md	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua
8	Tedy Cahyadi, S. Sos	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
9	Azudin, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Satuan Tugas
10	Dedi Kurniawan, SE	Sub Koordinator Teknis Penyelenggara Dan Hupmas	Anggota
11	Mergi Ravianti, A.Md	Pelaksana	Anggota
12	Herry, S.A.P	Pelaksana	Anggota
13	Iwan	Pelaksana	Anggota
14	Susilawati, S. Pd	PPNPN	Operator SPIP

Ditetapkan di Mempawah
 Pada Tanggal 11 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MEMPAWAH

ttd.

MUHAMMAD AGOES SOESANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MEMPAWAH
 Plt. Kasubbag Hukum,



Lampiran II : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah
 Nomor : 1/PW.01/6102/2021
 Tanggal : 11 Januari 2021
 Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2022

**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PELAKSANA
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2022**

No	Jabatan dalam Satuan Tugas	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Pengarah	a. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kebijakan kepada Satuan Tugas SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah. b. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang menandai tentang kegiatan yang efektif dan efisien, transparansi laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. c. Meminta pertanggungjawaban kegiatan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah. d. Memantau dan Mengevaluasi kegiatan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.
2.	Penanggung jawab	a. Memberikan pengarahan dan menyusun kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah. b. Memantau pelaksanaan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah. c. Bertanggungjawab, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.
3.	Ketua	a. Membuat Laporan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah. b. Mengawasi pelaporan yang disampaikan oleh Operator SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat secara berkala (bulanan dan tahunan).
4.	Sekretaris	a. Membantu Ketua Satuan Tugas SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah dalam melaksanakan tugasnya. b. Membantu mengkoordinasikan dan menyusun laporan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.

No	Jabatan dalam Satuan Tugas	Tugas dan Tanggung Jawab
5.	Koordinator Satuan Tugas	a. Menyelenggarakan kegiatan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah, sesuai dengan peraturan yang berlaku. b. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah. c. Menandatangani kartu kendali laporan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah secara berkala (bulanan dan tahunan).
6	Anggota Satuan Tugas	a. Mempersiapkan administrasi terkait pelaporan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah. b. Menyusun bahan-bahan untuk pelaporan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat secara berkala (bulanan dan tahunan).
7	Operator SPIP	a. Mengelola Administrasi dan Keuangan pelaksanaan kegiatan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah. b. Menyampaikan Laporan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat secara berkala (bulanan dan tahunan).

Ditetapkan di Mempawah
Pada Tanggal 11 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH,

ttd.

MUHAMMAD AGOES SOESANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
Plt. Kasubbag Hukum,

